

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Teori Stewardship

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, stewardship theory memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun shareholders pada khususnya. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Kecamatan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

2.1.1 Pengertian Auditing Sektor Publik

Mahmudi (2016) *Auditing Sektor Publik* adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada organisasi publik.

2.1.2 Tujuan Audit Sektor Publik

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa tujuan audit sektor publik untuk memberikan jaminan yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Dengan demikian auditing sektor publik pada dasarnya berperan dalam mewakili dan melindungi kepentingan rakyat dan pemangku kepentingan lainnya dari memperoleh informasi keuangan yang salah dan menyesatkan.

2.1.3 Jenis-jenis Audit Sektor Publik

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa 4 (empat) jenis audit pada organisasi sektor publik :

- a. Audit keuangan, yaitu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi. Audit keuangan pada organisasi sektor publik berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah termasuk BUMN.
- b. Audit kinerja atau *value for money*, yaitu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program,

fungsi, aktivitas/kegiatan. Audit kinerja pada organisasi sektor publik berupa pemeriksaan atas pengeolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

c. Audit dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja.

d. Audit forensik atau akuntansi forensik yaitu disiplin ilmu yang relatif baru dalam akuntansi. Kebutuhan akuntansi forensik di sektor publik dilatar belakangi oleh banyaknya kasus korupsi atas keuangan negara/daerah yang melibatkan penyelenggara negara.

2.1.4 Kelembagaan Auditing Sektor Publik

Mahmudi (2016) lembaga yang bertugas melaksanakan audit pada organisasi sektor publik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Audit internal, disebut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) karena lembaga audit yang berada di bawah pemerintahan atau merupakan bagian dari pemerintahan, bertugas untuk melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan negara.

b. Audit eksternal, auditor independen dan mandiri bukan bagian pemerintah yang diaudit. Audit eksternal bertugas untuk pemberian opini audit, membuat kesimpulan audit, dan rekomendasi serta menyelamatkan keuangan negara.

2.1.5 Kode Etik Auditor

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2016) menjelaskan terdapat lima prinsip dasar etika untuk Akuntan adalah:

- (a) Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- (b) Objektivitas - tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
- (c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:
 - (i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- (d) Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
- (e) Perilaku Profesional - mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan.

2.1.6 Integritas Auditor

Untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap auditor harus memenuhi tanggung jawabnya dengan menjunjung sifat integritas yang setinggi mungkin dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2016), prinsip integritas mewajibkan setiap Akuntan Profesional

untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.

Sukrisno Agoes (2017) menyatakan bahwa integritas bersifat utuh, tidak terbagi, menyatu, kokoh dan konsisten. Utuh dan tidak terbagi berarti seorang profesional memerlukan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku etis (*attitude*). Menyatu menyiratkan bahwa seorang profesional secara serius dan penuh waktu dalam menekuni profesinya. Sedangkan kokoh dan konsisten menyiratkan pribadi yang berprinsip, percaya diri, tidak mudah goyah dan tidak terpengaruh orang lain. Integritas merupakan dasar penegakan etika karena jika integritas sudah melekat menjadi sifat seseorang, maka atribut-atribut lainnya sudah dengan sendirinya menjadi

Menurut Mulyadi (2016) dalam memenuhi tanggung jawab profesinya, auditor mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi hal ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila auditor memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya.

Menurut IAI (2016) dalam audit atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip dasar, baik secara individual dan kolektif, mendukung penerapan skeptisisme profesional, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut: Integritas mensyaratkan Akuntan bersikap lugas dan jujur. Contoh, akuntan mematuhi prinsip integritas dengan: (a) Bersikap lugas dan jujur ketika mengemukakan perhatian atas suatu posisi yang diambil oleh klien; dan (b) Melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak konsisten dan mengumpulkan bukti audit lanjutan untuk mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material agar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup tentang tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut. Dengan demikian, Akuntan menunjukkan penilaian kritis berdasarkan bukti audit yang berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional.

Menurut Sukrinah *et al.*, (2009) dalam Rifai & Mardijuwono (2020), pengukuran indikator integritas seorang auditor adalah sebagai berikut :

- a. Kejujuran Auditor , seorang auditor yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.
- b. Keberanian Auditor, meskipun kecurangan bisa disembunyikan tetapi auditor harus bisa mendeteksi kecurangan tersebut. Kecurangan (*fraud*) lebih sulit dideteksi oleh auditor karena fraud sering kali mencakup unsur kolusi dan pemalsuan dokumen.

c. Sikap bijaksana auditor, artinya auditor melaksanakan tugasnya dengan tidak tergesa-gesa melainkan berdasarkan pembuktian yang memadai.

d. Tanggung jawab auditor, seorang auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Pekerjaan auditor ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan klien yang di audit bebas dari salah saji material. Penyebab salah saji material itu dapat berupa kekeliruan, kecurangan ataupun pelanggaran hukum.

2.2 Komitmen Organisasi

Penipuan dianggap sebagai salah satu masalah utama yang menimbulkan tantangan serius untuk semua jenis organisasi bisnis. Menurut Rifai & Mardijuwono (2020) Komitmen organisasi adalah penerimaan yang kuat dari individu terhadap tujuan dan nilai perusahaan atau instansi, dimana individu akan berusaha dan bekerja dan memiliki keinginan yang kuat untuk tetap berada di dalam perusahaan atau instansi. Komitmen organisasi awalnya terbentuk dari pribadi diri karyawan itu sendiri. Berawal dari kebutuhan pribadi terhadap organisasi, lalu menjadi kebutuhan bersama (kedua belah pihak), sehingga akhirnya menjadi rasa memiliki antar karyawan dalam organisasi. Didalam suatu organisasi harus terdapat sebuah komitmen yang tinggi karena dengan terciptanya sebuah komitmen yang tinggi akan mempengaruhi suasana kerja yang professional dan dengan adanya komitmen organisasi yang kuat, maka organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya yang positif dan yang telah ditetapkan.

Komitmen yang dikonseptualisasikan sebagai kondisi psikologis atau pola pikir yang mencirikan hubungan karyawan dengan organisasi dan menentukan

niat karyawan untuk tetap berada di organisasi dan bisa dilihat sebagai hubungan emosional dengan organisasi, perasaan bertugas dan memiliki, ditambah dengan biaya yang dirasakan untuk meninggalkan organisasi (Menurut Meyer *et al.*, (2009) dalam Olafsen *et al.*, 2020). Dalam konteks organisasi, para sarjana telah memperluas teori ini menjadi menyarankan kontrak psikologis antara pengusaha dan karyawan adalah kuncinya mekanisme dalam menjaga timbal balik dan meningkatkan tingkat komitmen karyawan (Kim *et al.*, 2017).

Meyer *et al.*, (2009) dalam Kim *et al.*, (2017) indikator yang digunakan untuk mengukur komitmen organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen afektif berkaitan dengan hubungan emosional anggota dengan organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan menjalankan kegiatan di organisasi dengan sebaik-baiknya. Seorang anggota organisasi dengan komitmen afektif yang tinggi secara efektif akan terus menjadi anggota organisasi karena memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk itu.
- b. Komitmen kelanjutan berkaitan dengan kelanjutan komitmen terkait kesetiaan pegawai atau kesadaran anggota organisasi akan mengalami kerugian jika keluar dari organisasi. Seorang karyawan dengan kontinuitas keterlibatan yang tinggi akan terus menjadi anggota organisasi karena mereka perlu menjadi anggota organisasi tersebut.
- c. Komitmen normatif menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi tersebut. Seorang pegawai dengan komitmen normatif yang

tinggi akan tetap menjadi anggota organisasi karena merasa harus berada di dalam organisasi tersebut dan merasa bangga menjadi anggota organisasi tersebut.

2.3 *Good Corporate Governance*

Sedarmayanti (2017) *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan ekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2002, merumuskan arti *Good Corporate* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Kelembagaan yang responsif haruslah transparan dan berfungsi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar keberfungsian dapat dinilai berkeadilan (Rusdiyanto *et al.*, 2019). Pemerintah Indonesia dalam Bank Indonesia telah menetapkan aturan untuk menjamin pelaksanaan GCG melalui peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola melalui penerapan beberapa prinsip, yaitu:

- a. *Transparansi (Transparency)*, yaitu prinsip yang menjunjung keterbukaan dalam mengungkapkan segala informasi yang material secara memadai, tepat waktu dan akurat serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.
- b. *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu prinsip yang menuntut adanya kejelasan fungsi atau pemisahan tugas dan pelaksanaan tanggung jawab setiap bagian dalam pemerintah sehingga instansi dapat dikelola dengan baik.
- c. *Pertanggung Jawaban (Responsibility)*, yaitu prinsip yang mengharuskan agar pengelolaan pemerintah sesuai dan patuh terhadap prinsip korporasi yang sehat dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Kemandirian (Independency)*, yaitu prinsip yang mengharuskan pengelolaan pemerintah secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun.
- e. *Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)*, yaitu prinsip yang menuntut pemenuhan hak-hak pemegang saham secara adil dan setara sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2.4 Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan

Coso 1992 dalam BPK (2012) pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain instansi untuk dapat

memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku.

Menurut Tunggal (2016) pencegahan kecurangan di pemerintahan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kultur organisasi di instansi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam program *fraud*, proses tata kelola pemerintahan yang baik memegang peran kunci. Namun, aktivitas kecurangan dapat terjadi terlepas dari semua upaya dewan, unit manajemen risiko, auditor internal, dan pihak berkepentingan lainnya. Karena penipuan dan penyalahgunaan dapat terjadi di berbagai tingkatan di setiap organisasi, penting bahwa mekanisme pencegahan dan pendeteksian yang tepat tersedia.

Arens *et al.*, (2016) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pengukuran tata kelola yang baik untuk mencegah kecurangan (*fraud*) diantaranya :

- a. Menetapkan *tone at the top*, manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan “tone at the top” dan dilandasi dengan kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat kejujuran dan integritas karyawan di suatu organisasi.
- b. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, tempat kerja yang positif dapat mendorong semangat karyawan, yang dapat mengurangi kemungkinan karyawan melakukan kecurangan di suatu organisasi.

c. Pelatihan, semua pegawai harus dilatih untuk menyampaikan kecurangan aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian Integritas Auditor, Komitmen Organisasi, dan *Good Corporate Governance* telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>Internal auditor's compliance to code of ethics: Empirical findings from Malaysian Government-linked companies</i> (Alias, N.F., Nawawi, A. and Salin, A.S.A.P. 2019)	Variabel Independen X ₁ . Kepatuhan Auditor X ₂ . Integritas Auditor X ₃ . Objektivitas Auditor Variabel Dependen Y. Pencegahan Kecurangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa objektivitas dan integritas auditor yang tinggi berpengaruh positif ketika dihadapkan selama penugasan audit dan mendeteksi serta mencegah perilaku tidak etis (kecurangan).
2	<i>Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention</i> (Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. 2020)	Variabel Independen X ₁ . Integritas Auditor X ₂ . Komitmen Organisasi Variabel Dependen Y. Pencegahan Kecurangan	Hasil penelitian ini menemukan bahwa integritas auditor dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	<p><i>Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: Evidence from the UAE</i></p> <p>(Halbouni, Sawsan Saadi Obeid, Nada Garbou, Abeer, 2016)</p>	<p>Variabel Independen</p> <p>X₁. Tata Kelola</p> <p>X₂. Teknologi Informasi</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y. Pencegahan Kecurangan</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa tata kelola perusahaan & teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.</p>
4	<p><i>Expressing Negative Emotions in Work Relationships and Affective Organizational Commitment: A Latent Difference Score Approach</i></p> <p>(Brueller, D., Brueller, N.N. and Doveh, E. 2020)</p>	<p>Variabel Independen</p> <p>X₁: Hubungan Karyawan</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y. Komitmen Kerja</p> <p>Variabel Control</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gender - Education - Age 	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan karyawan yang berdasarkan dari gender, pendidikan, dan usia menunjukkan hasil positif terhadap komitmen kerja untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.</p>
5	<p><i>The effects of organizational and job characteristics on employees' organizational commitment in arts-and-culture organizations.</i></p> <p>(Sabella, A.R., El-</p>	<p>Variabel Independent</p> <p>X₁. Karakteristik Organisasi</p> <p>X₂. Pekerjaan</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y.Komitmen Organisasi</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan efek positif dari karakteristik organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk pencegahan kecurangan laporan keuangan.</p>

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Far, M.T. and Eid, N.L. 2016)		
6	<p><i>“Transparency” in Accounting and Corporate Governance: Making Sense of Multiple Meanings</i></p> <p>(Stein, Mitchell J., Steven E. Salterio, 2017)</p>	<p>Variabel Independen</p> <p>X1. Tranparasi Keuangan</p> <p>X2. Tata Kelola Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y. Pencegahan Kecurangan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan berpengaruh positif untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dalam mencegah kecurangan laporan keuangan.</p>
7	<p><i>Relationship between Good Governance and Integrity System: Empirical Study on the Public Sector of Malaysia</i></p> <p>(Said, J., Alam, M.M. and Khalid, M.A. 2016)</p>	<p>Variabel Independen</p> <p>X1. Tata Kelola Yang Baik</p> <p>X2. Integritas Sistem</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y. Pencegahan Kecurangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang baik signifikan hubungan positif dengan praktik integritas di sektor publik Malaysia dalam mencegah kecurangan laporan keuangan.</p>
8	<p><i>Accounting Information in Corporate Governance: Implications for Standard Setting</i></p> <p>(S. P. Kothari, 2019)</p>	<p>Variabel Independen</p> <p>X1. Informasi Akuntansi</p> <p>X2. Penerapan Standar Akuntansi</p> <p>Variabel Dependen</p> <p>Y. <i>Corporate Governance</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi akuntansi dan penerapan standar akuntansi berpengaruh positif untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mencegah kecurangan laporan keuangan..</p>

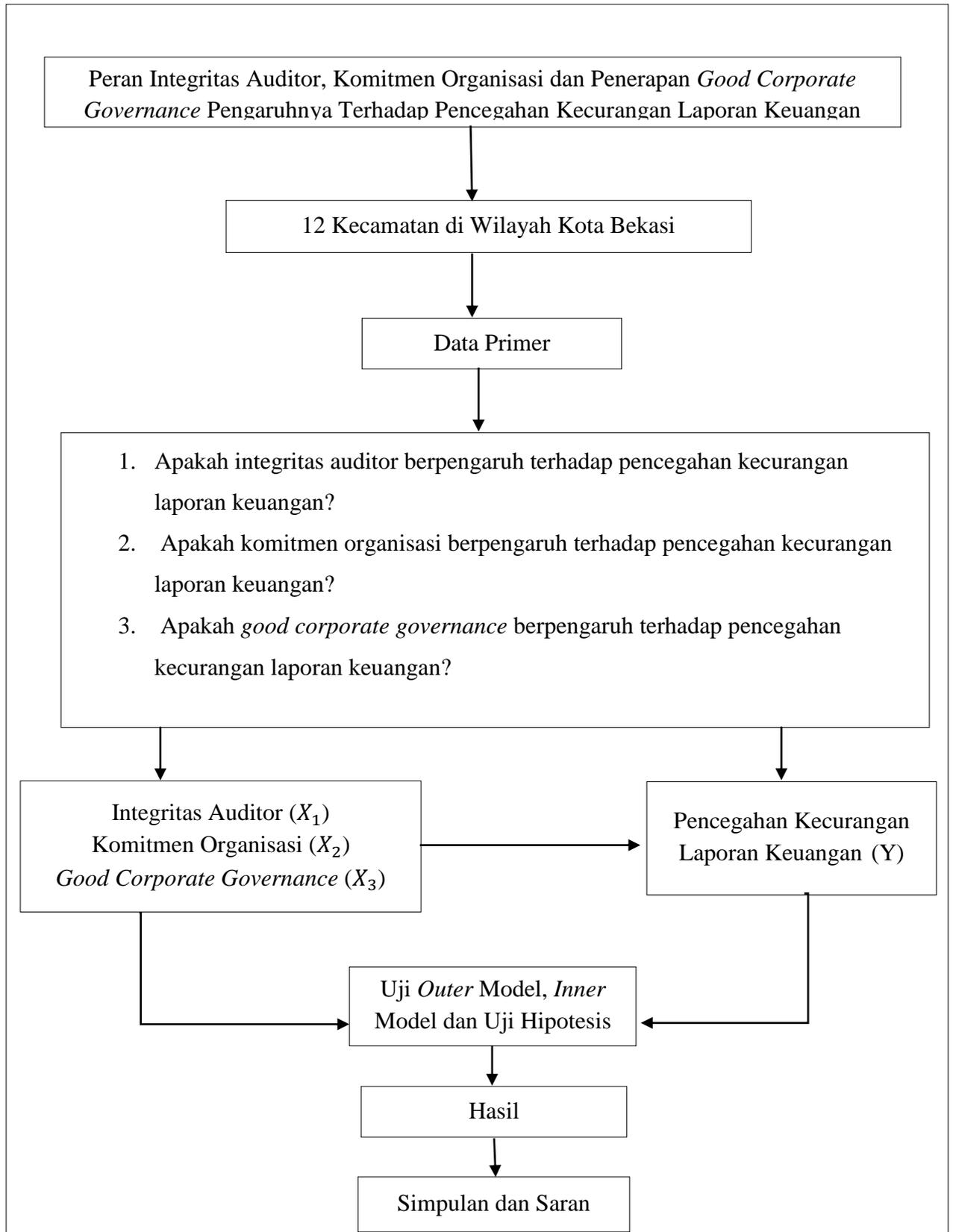
No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9	<i>Psychological contract congruence, distributive justice, and commitment</i> (Kim, S. H., Laffranchini, G., Wagstaff, M. F., & Jeung, W, 2017)	Variabel Independen X1. Pemenuhan Kontrak X2. Pemberi Kerja Variabel Dependen Y. Komitmen Kerja	Penelitian ini menunjukkan kesesuaian antara pemenuhan kontrak psikologis karyawan dan pemberi kerja berhubungan positif dengan komitmen kerja seseorang untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.
10	<i>Accounting fraud and prevention in listed companies in China</i> (Li, P., & Yang, Z. 2019).	Variabel Independen X1. Tata Kelola Perusahaan X2. Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen Y. Pencegahan Kecurangan	Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa struktur tata kelola dan sistem pengendalian intenral berpengaruh positif dalam mencegah kecurangan laporan keuangan.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

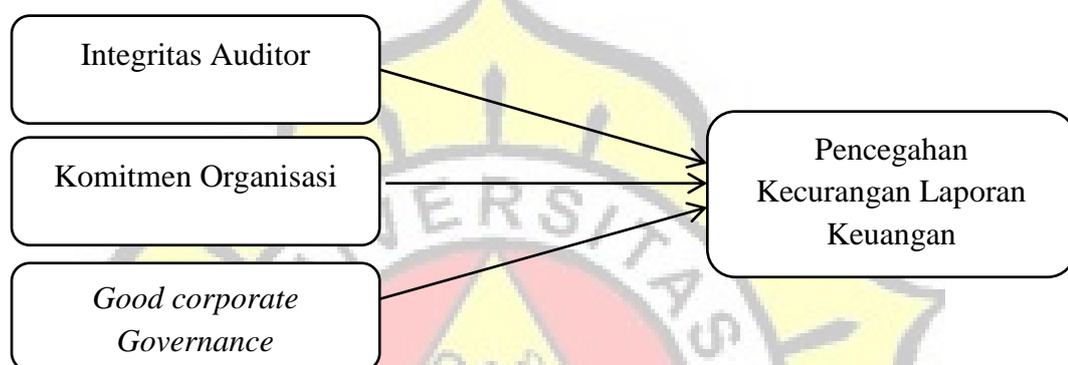
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.7 Model Konseptual

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan 3 (tiga) variabel independent dan 1 (satu) variabel dependent yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2.2
Model Konseptual



Sumber : Data Diolah Sendiri (2020)

Dari bagan yang disajikan diatas hendak melihat bahwa pencegahan kecurangan laporan keuangan dipengaruhi oleh tiga variabel independen yaitu integritas auditor, komitmen organisasi dan penerapan *good corporate governance*.

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah rumusan dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.8.1 Hubungan Integritas Auditor dengan Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan

Integritas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari hasil kerja auditor di pemerintahan dan auditor itu sendiri adalah salah satu

pihak yang penting dalam mencegah kecurangan laporan di lingkungan pemerintahan itu. Rifai & Mardijuwono (2020) menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan mendukung peningkatan kinerjanya, auditor harus menjunjung tinggi prinsip integritas untuk bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai etika, dan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk membangun kepercayaan yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang andal.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Rifai & Mardijuwono (2020) yang berjudul *Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention* diperoleh bahwa auditor yang berintegritas tinggi dapat mencegah kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

Ho₁ : Integritas Auditor berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.

Ha₁ : Integritas Auditor berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.

2.8.2 Hubungan Komitmen Organisasi dengan Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan

Komitmen organisasi mengacu pada "kekuatan relatif individu identifikasi dan keterlibatan dalam organisasi tertentu" (Mowday *et al.*, (2014) dalam Brueller *et al.*, (2020). Untuk mencapai tujuan organisasi yang baik, maka dibutuhkan komitmen antara seorang pegawai dan organisasi itu sendiri. Secara jelas bahwa komitmen organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena

pegawai yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasinya cenderung memiliki sikap keberpihakan, rasa cinta, rasa bangga terhadap organisasi, dan merasa berkewajiban untuk memajukan organisasinya (Rifai & Mardijuwono, 2020)

Menurut penelitian Brueller *et al.*, (2020) yang berjudul *Expressing Negative Emotions in Work Relationships and Affective Organizational Commitment: A Latent Difference Score Approach* di tempat kerja yang menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

Ho₂ : Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.

Ha₂ : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.

2.8.3 Hubungan *Good Corporate Governance* dengan Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan

Rusdiyanto *et al.*, (2019) menyatakan bahwa *good corporate* sektor publik diartikan suatu proses tata kelolaan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Insiden penipuan pemerintah yang terus meningkat menunjukkan bahwa penekanan yang tidak efektif pada pencegahan penipuan dan mekanisme

pencegahan sedang diprioritaskan oleh organisasi. Dalam banyak kesalahan pemerintah baru-baru ini, kegagalan struktur tata kelola pemerintah sebagai alat pemantauan yang efektif telah disorot menjadi salah satu alasan untuk mencegah penipuan pelaporan keuangan. Bila instansi pemerintah atau perusahaan menerapkan *good governance* maka transparansi dan pelaksanaan fungsi akuntansi akan semakin baik dan dapat menekan kecurangan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Halbouni et al., (2016) dengan judul *Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: Evidence from the UAE* menunjukkan hasil bahwa tata kelola perusahaan dan teknologi informasi memiliki pengaruh atas peran terhadap pencegahan kecurangan.. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

H₀₃ : Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan

H_{a3} : Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.